



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dompu;
3. Bupati adalah Bupati Dompu;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

- dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
 9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
 11. Indikator Kinerja Utama (*Key Perfomance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dompu diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
- b. Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus.

Pada Tanggal 24 Juli 2022

BUPATI DOMPU,


KADEK JAELANI

Diundangkan di Dompus

Pada tanggal, 30 Juli 2022

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM., M.KES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR: 364

LAMPIRAN : I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : Juli 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan pencrapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Dompu, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Dompu, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI DOMPU,



KADEK JAELANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR : 41 TAHUN 2022
 TANGGAL: 29 Juli 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
 IKU KAB.DOMPU.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	RSUD, Dukcapil, DPMPTSP
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kemenpanrb	LHE Kemenpanrb	SELURUH PD
	Opini BPK	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil Penilaian BPK Terhadap LKPD	BPKAD
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Keuangan	BAPPENDA

<p>Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian</p>	<p>PDRB sektor pertanian th. {n} - PDRB sektor pertanian th. {n-1} / PDRB sektor pertanian th. {n-1} X 100%</p> <p>PDRB sektor pertanian = PDRB sub sektor tanaman pangan (ADHK) + PDRB sub sektor hortikultura (ADHK) + PDRB sub sektor perkebunan (ADHK) + PDRB sub sektor peternakan (ADHK) ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	<p>Dompu Dalam Angka, BPS</p>	<p>DISTANBUN</p>
<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan</p>	<p>PDRB sektor perikanan th. {n} - PDRB sektor perikanan th. {n-1} / PDRB sektor perikanan th. {n-1} X 100%</p> <p>ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	<p>Dompu Dalam Angka, BPS</p>	<p>DISKAMLUT</p>
<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata</p>	<p>PDRB sektor pariwisata th. {n} - PDRB sektor pariwisata th. {n-1} / PDRB sektor pariwisata th. {n-1} X 100%</p> <p>ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	<p>Dompu Dalam Angka, BPS</p>	<p>DISBUDPAR</p>

	<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dan Perdagangan Serta Jasa</p>	<p>Selisih nilai omset pedagang pada tahun yang bersangkutan dengan nilai omset pedagang pada tahun sebelumnya dibagi nilai omset pada tahun sebelumnya dibagi nilai omset tahun sebelumnya dikalikan 100%</p>	<p>Data jumlah pedagang dan omset kios/toko dan IKM Kabupaten Dompus</p>	<p>DISPERINDAG</p>
	<p>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi UKM Dan IKM</p>	<p>PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (h) - PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (n-1) / PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (n-1) X 100%</p> <p>ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	<p>Dompus Dalam Angka, BPS</p>	<p>DISKOPUKM</p>
<p>Menurunnya Tingkat Kesenjangan Masyarakat</p>	<p>Gini Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka Kemampuan Daya Beli Masyarakat</p>			
	<p>Skor Pola Pangan Harapan</p>	<p>Rata-rata pengeluaran perkapita dalam setahun</p>	<p>BPS</p>	<p>DISNAKERTRANS BINSOS</p>
				<p>DKP</p>

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani/jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%	BPS	DIKPOR
	Harapan Lama Sekolah	Penjumlahan dari penduduk yang bersekolah usia 7-23 tahun menurut umur/jumlah penduduk usia 7-23 tahun x 100%	BPS	DIKPOR
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	DINKES
	Prevalensi stunting			DINKES
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Kelahiran Yang Hidup per 1000 penduduk	DPPKB	DPPKB
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$1/3 \times (\text{harapan hidup} \times \text{harapan pendidikan} \times \text{indeks distribusi pendapatan})$	BPS	DPPKB
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Serta Pengembangan Wilayah	Persentase Jalan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/panjang seluruh jalan kabupaten x 100%	Rekap data jalan dan jembatan	DPUPR

	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Panjang jaringan irigasi kondisi baik kewenangan Kabupaten _____ X 100% Panjang Jaringan irigasi kewenangan Kab	DPU/PR	Bidang SDA
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum	RT yang terlayani Jaringan air bersih X 100 %/jumlah total RT	DPU/PR	Bidang Cipta Karya
	Persentase Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak	Jumlah RT berakses sanitasi X 100 %/jumlah total RT	DPU/PR	Bidang Cipta Karya
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah kecelakaan/jumlah penduduk x 100%	Rekap data kecelakaan	DISHUB
Berkurangnya Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Terpantau Kumuh			DISPERUMKIM
	Cakupan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah keseluruhan rumah yang ada	DISPERUMKIM	DISPERUMKIM

	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>$(30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$</p> <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Lahan/Hutan</p> <p>cat: jika data tidak tersedia menggunakan Indeks yang sudah ada</p>	<p>SLHD</p>	<p>DLH</p>
<p>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana</p>	<p>Indeks Kualitas Air</p>	<p>$P_{ij} = \sqrt{\frac{C_i}{U_{ij}} \times M_i + \frac{C_j}{U_{ij}} \times R_j / 2}$ <p>Dimana: Lj: Konsentrasi Parameter Kualitas air yang dicatumkan dalam buku mutu penuntukan air (j) Ci: Konsentrasi Parameter Kualitas air (i) Pij: Indeks pencemaran bagi peruntukan (i) (Ci/Lij)M: Nilai Ci/Lij Maksimum dan (Cj/Lij)R: Nilai Ci/Lij rata-rata</p> </p>	<p>Kepmen LH No 115 Tahun 2013</p>	<p>DLH</p>

	Indeks Tutupan Lahan	ITL = LHP + LHS / LKH Dimana: ITL = Indeks Tutupan Lahan LHP = Luas Hutan Primer LHS = Luas Hutan Sekunder LKH = Luas Kawasan Hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan	Kepmen LH No: Kep-45/MENLH/10/1997	
	Indeks Kualitas Udara	IPU = IPNO2 + IPSO2 / 2 Dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2	Kepmen LH No: Kep-45/MENLH/10/1997	DLH
	Persentase Sampah Yang Dikelola			
	Cakupan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa yang tangguh bencana : Jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Dompu	Data BPBD	BPBD
Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat Yang Berbudaya	Persentase Penurunan Tindakan Kriminalitas Di Masyarakat	Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk x 10000	Data Kriminalitas	BAKESBANGPOL dan POLPP
Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya	Peningkatan prestasi dibidang kepemudaan, olahraga, seni dan budaya			DISBUDPAR

Bappeda & Litbang.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Persentase Kesesuaian Antara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Program yang diakomodir kedalam APBD dibagi dengan keseluruhan program yang ada dalam RPJMD dikali 100	Bappeda dan Litbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
Meningkatnya fungsi litbang dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Opini Kemendagri	Kemendagri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	LHE APIP	LHE Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya/situs dan seni budaya	Cakupan cagar budaya/situs dan seni budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya/ situs dan seni budaya yang dilestarikan		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatkan daya saling pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Dinas Kesehatan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p>	<p>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</p>	<p>AHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan Program Mortpak Lite</p>	<p>BPS</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
	<p>Angka kematian Ibu (AKI)</p>	<p>Jumlah kasus kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 penduduk</p>	<p>Laporan PWS KIA</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
	<p>Angka Kematian Bayi (AKB)</p>	<p>Jumlah kasus kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 penduduk</p>	<p>Laporan PWS KIA</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>

Prevalensi stunting	Jumlah balita stunting yang ditangani dibagi jumlah seluruh balita stunting yang ada di kabupaten di kali 100	Laporan Gizi	Dinas Kesehatan
Presentase puskesmas yang terakreditasi utama	Jumlah PKTP yang terakreditasi dibagi jumlah FKTP (Fasilitas kesehatan tingkat pertama) yang ada di kabupaten Dompu di kali 100	Laporan Akreditasi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penyakit menular dan tidak menular pengurangan resiko pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular yang tertangani di bagi cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular yang tidak tertangani	Laporan Rutin/Tahunan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	LHE Inspektorat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APD	

Dinas Koperasi dan UKM.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Jumlah koperasi Berkualitas	Pemeringkatan Koperasi	Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi	Bidang pembinaan koperasi bidang pembinaan KSP/USP
Meningkatnya daya Saing UMKM	Produktifitas UMKM	Omzet (Miliar)	Data hasil pendataan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Sosial.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosia	Persentase PMKS dan yang diberdayakan	Rasio Jumlah PMKS yang diberdayakan dibagi Rasio jumlah PMKS dikali 100%	DINSOS	Dinas Sosial
	Persentase PMKS dan yang direhabilitasi	Rasio Jumlah PMKS yang direhabilitasi dibagi Rasio jumlah PMKS dikali 100%	DINSOS	Dinas Sosial

	Persentase PMKS yang terdata dalam JKN	Rasio Jumlah PMKS yang terdata dalam JKN dibagi Rasio jumlah PMKS dikali 100%	DINSOS	Dinas Sosial
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE Inspektorat	Dinas Sosial

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akses Layanan PAUD	APK PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA Penitipan Anak dibagi jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%		
Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar Yang Bermutu	Persentase Siswa Dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SD Memenuhi Kompetensi Minimum	Jumlah siswa yang memenuhi nilai standar minimal AKM dibagi Jumlah Peserta kelas 5 yang mengikuti AKM pada Jenjang SD/MI pada Tahun berjalan dikalikan 100%		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	<p>Persentase Siswa Dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SD Memenuhi Kompetensi Minimum</p>	<p>Jumlah siswa yang memenuhi nilai standar minimal AKM dibagi Jumlah Siswa kelas 5 pada jenjang SD/MI pada Tahun berjalan di kali 100%</p>		<p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p>
	<p>Persentase Siswa Dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SMP Memenuhi Kompetensi Minimum</p>	<p>Jumlah siswa yang memenuhi nilai standar minimal AKM dibagi Jumlah Peserta kelas 8 yang mengikuti AKM pada Jenjang SMP/MTS pada Tahun berjalan di kali 100%</p>		<p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p>
	<p>Persentase Siswa Dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SMP Memenuhi Kompetensi Minimum</p>	<p>Jumlah siswa yang memenuhi nilai standar minimal AKM dibagi Jumlah Siswa kelas 8 pada Jenjang SMP/MTS pada Tahun berjalan di kali 100%</p>		<p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p>
<p>Meningkatnya prestasi pemuda</p>	<p>Prestasi Pemuda di Tingkat Provinsi dan Nasional</p>	<p>Jumlah perolehan putri Indonesia, Pertukaran pemuda antar negara, pemuda pelopor dan pemuda nusantara, kapal pemuda nusantara</p>		<p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p>

	Prestasi olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Perolehan PORPROV, PON, POPDA, POPNAS, KEJURNAS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Investasi PMA / PMDN	Jumlah nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) dalam 1 tahun	Data Investasi pada bidang Kerjasama dan Promosi PM dan Bidang Pengembangan dan Pengendalian PM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	--------------------------------------------------------

Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penataan pelayanan administrasi Kinerja Aparatur dan Sistem Pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Hasil Penilaian Badan Kepegawaian Negara terhadap pelaksanaan Implementasi Indeks NSPK manajemen ASN pada Pemerintah Kabupaten Dompu	Bidang Pengadaan dan Pembinaan dan Bidang Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata Indeks profesionalitas ASN	Hasil Penilaian Badan Kepegawaian Negara Terhadap Indeks Profesionalitas ASN dilengkap Pemerintah Kabupaten Dompu.	Bidang Pengadaan dan Pembinaan dan Bidang Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas, berkompeten dan professional.	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi ASN, PNS yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total Jumlah Pegawai di kali 100%	Bidang PSDM	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	LHE APIP Nilai SAKIP OPD	LHE Inspektorat	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang ----- ---- 100% Panjang seluruh jalan Kabupaten	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya jaringan irigasi yang memadai	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ----- ---- 100% Luas irigasi kabupaten	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya akses air bersih/air minum & sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga pengguna Jaringan air bersih/air minum	Jumlah rumah tangga pengguna jaringan air bersih/air minum --- 100%	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak	Jumlah Total Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak --- 100%	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya tenaga kerja konstruksi yang terlatih	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Total Rumah Tangga Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis - 100%	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan RTRW	Persentase Dokumen Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang --- 100%	Laporan Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKEP OPD	LHE APIP	LHE APIP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang Layak	Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah keseluruhan rumah yang ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani dibagi jumlah keseluruhan kawasan kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Backlog Perumahan	Jumlah RT dikurang Jumlah RT yg memiliki hunian tetap dibagi Jumlah RT dikali 100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE APIP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kesadaran berpolitik dan kerukunan hidup masyarakat	Tingkat partisipasi pemilu	Jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih tetap x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Cakupan konflik sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE Inspektorat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa	Jumlah Korban Bencana yang tertangani dibagi dengan jumlah keseluruhan korban	Data BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APiP	LHE Inspektorat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
------------------------------------------------------------------	-----------------	----------	-----------------	-------------------------------------

Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran produk hukum Daerah	Jumlah Penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah dibagi keseluruhan produk hukum daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah management kebakaran(WMK)	Waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja YG bersertifikat di bagi Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di kali 100 %	Laporan Data	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	Laporan data	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Proporsi Pejabat Perempuan di Perangkat Daerah	Jumlah Pejabat Perempuan Ess 2 & Ess 3 di PD/ total jumlah Pejabat Ess 2, Ess 3 di PD	Data dari BKD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Tingkat Capaian Pengarus Utamaan Gender	Nilai Skor APE	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak
	PD dan Stakeholder responsive gender	Jumlah OPD, Desa/Kel, Organisasi Wanita yang sudah ARG/ Jumlah Total OPD, Desa/kel, Organisasi Wanita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah KDRT yang melapor (data/simphony)/ Jumlah Kepala Keluarga (data dukcapil) x 100 95 / 62219 x 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dan Anak termasuk anak berkebutuhan khusus	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan Perempuan yang terlapor/ Jumlah total perempuan x 100 156 / 81555 x 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak
	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan Anak yang terlapor/ Jumlah total Anak (0-18) x 100 97 / 71585 x 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
------------------------------------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Dinas Ketahanan Pangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kemantapan Ketahanan Pangan	Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Daerah		HASIL ANALISIS DATA SUSENAS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021	Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks ketersediaan pangan	Ketersediaan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks keterjangkauan pangan	Keterjangkauan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks pemanfaatan pangan	Pemanfaatan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Perkembangan Desa	Persentase Desa Maju	Jumlah Desa Maju dibagi dengan jumlah total desa yang ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase BUMDes Maju	BUMDes Maju dibagi dengan Keseluruhan BUMDes yang ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR) Per Wus usia 15-49 tahun)	Jumlah Kelahiran Yang Hidup per 1000 penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase kendaraan umum layak jalan	Kendaraan umum layak jalan dibagi dengan jumlah kendaraan umum keseluruhan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Cakupan fasilitas perhubungan laut	Perbandingan fasilitas perhubungan laut dibagi dengan total fasilitas yang ada	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Dompu menjadi Kabupaten dengan E-Governmen yang berkualitas	Indeks SPBE	Rasio nilai dari indeks SPBE	Laporan DISKOMINFO	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Akses Informasi dan Komunikasi Publik yang berbasis Elektronik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Rasio nilai sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (Money KIP)	Laporan DISKOMINFO	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tersedianya satu data yang di terintegrasi	Persentase Integrasi data daerah	Jumlah data yang terintegrasi	Laporan hasil kegiatan semester	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE Inspektorat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Binaan	Tingkat Kunjungan perpustakaan per tahun	Tingkat Kunjungan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Perbandingan jumlah perpustakaan dibandingkan dengan total jumlah penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Cakupan ketersediaan koleksi terhadap jumlah penduduk	Perbandingan jumlah buku yang dikoleksi dibandingkan dengan total jumlah penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	-----------------------------------------

Dinas Pertanian dan Perkebunan				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kontribusi PDRB SEKTOR Pertanian dan Perkebunan	Kontribusi PDRB SEKTOR Pertanian dan Perkebunan			
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan (Padi)	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Produksi Tanaman Pangan (Porang)	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Porang)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Produksi Tanaman Hortikultura (Bawang Merah)	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Bawang Merah)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe Besar)	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe Besar)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Produksi Tanaman Perkebunan (Jambu Mete)	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Jambu Mete)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Produksi Tanaman Perkebunan (Tembakau)	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Tembakau)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Produksi Tanaman Perkebunan (Tebu)	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Tebu)	BPS	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE APIP	Dinas Pertanian dan Perkebunan
--------------------------------------------------------	-----------------	----------	----------	--------------------------------

Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N)	Statistik Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Produksi Budidaya Air Payau + Air Tawar + Budidaya LAUT) Tahun N	Statistik Bidang perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
	Volume Produksi Olahhan Perikanan	(Volume Produksi Olahhan Perikanan Tahun N)	Statistik Bidang PDSPKP	Bidang PDSPKP
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE APIP	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	$\left(\frac{\text{Populasi tahun berjalan} - \text{Populasi tahun sebelumnya}}{\text{Populasi tahun sebelumnya}} \right) \times 100 \%$	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Budidaya, Pakan, Agribisnis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	LHE APIP	LHE APIP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya nilai Transaksi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Pedagang	Selisih nilai omset pedagang pada tahun yang bersangkutan dengan nilai omset pedagang pada tahun sebelumnya dibagi nilai omset pada tahun sebelumnya dibagi nilai omset tahun sebelumnya dikalikan 100%	Data jumlah pedagang dan omset kios/toko dan IKM Kabupaten Dompus	Bidang Perdagangan Bidang Pengawasan Perdagangan dan Industri
Meningkatnya Nilai Produksi Sentra IKM Formal	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sentra IKM	Selisih nilai produksi IKM pada tahun yang bersangkutan dengan nilai produksi IKM pada tahun sebelumnya dibagi nilai produksi tahun sebelumnya dikalikan 100%	Data Nilai produksi perusahaan Industri menurut jenis usaha dan kategori usaha	Bidang Industri

Meningkatnya Pertumbuhan IKM Formal	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	Selisih Jumlah IKM Formal pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah IKM Formal pada tahun sebelumnya dibagi jumlah IKM Formal tahun sebelumnya dikalikan 100%	Data Banyaknya Pengolahan Industri Menurut Jenis usaha dan Kategori Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Dinas Perindustrian dan Perdagangan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan kepada lembaga DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat	Persentase capaian layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	Jumlah capaian layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD dibagi dengan total jumlah layanan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya layanan keuangan kepada anggota DPRD	Persentase capaian layanan hak keuangan dan administratif lembaga DPRD	Jumlah capaian layanan hak keuangan dan administratif lembaga DPRD dibagi dengan total jumlah layanan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Cakupan ketersediaan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah ketersediaan lokasi pembangunan utk kepentingan umum/target ketersediaan lokasi pembangunan utk kepentingan umum x 100	Sertifikat, Dokumen Ganti Rugi Tanah / Pengadaan Tanah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola di bidang Pemerintahan dan kesra	Persentase realisasi kebijakan di bidang pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan kesra yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan kesra yang terlaksana/ target kebijakan di bidang pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan kesra yang terlaksana x 100	Dokumen, Laporan	Kepala Bagian Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesra
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase realisasi kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA, Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana/ target kebijakan di bidang Perekonomian & SDA, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana x	Dokumen, Lap,oran	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

		1000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Umum dan Administrasi Umum	Persentase realisasi kebijakan di bidang Umum, Organisasi, Prokopim dan Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang Umum, Organisasi, Prokopim dan Perkeu yang terlaksana/ target kebijakan di bidang Umum, Organisasi, Prokopim dan Perkeu yang terlaksana x 100	Dokumen, Laporan, Data Pakevunit Pengadaan	Kepala Bagian Umum, Organisasi, Prokopim dan Perencanaan dan Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	LHE Inspektorat / Kemncpan RB	Seluruh Bagian

INSPEKTORAT KABUPATEN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pengendalian Intern	Presentase temuan yang ditindak-lanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah temuan hasil pemeriksaan dikali 100%	Laporan Hasil Pemantuan Tindak Lanjut BPK Semesteran	Sekretaris, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Level Maturitas SPIP	Laporan Hasil Penilaian Level Maturitas SPIP	Sekretaris, Kasubag Perencanaan
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP yang merupakan hasil penilaian BPKP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Sekretaris, Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Prosentase Nilai SAKIP A	Jumlah OPD yang nilai AKIPnya "A" dibagi Jumlah OPD yang dievaluasi AKIPnya dikali 100%	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Inspektur Pembantu
Meningkatnya Capaian Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Prosentase Capaian Rencana Aksi KPK	Hasil Penilaian MCP KPK	Laporan Hasil Penilaian MCP KPK melalui Jaga.id	Inspektur Pembantu

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		Inspektorat
------------------------------------------------------------------	-----------------	--	-------------

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

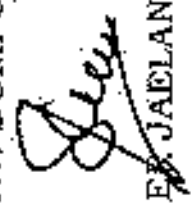
SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPKAD	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Data BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Hasil Review Inspektorat terhadap Dokumen Sakip OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey		

<p>Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>Cakupan kepemilikan KTP-el dibanding jumlah wajib KTP-el</p>	<p>Jumlah KTP-el yang tercetak dibagi Jumlah Wajib KTP-el dikali 100</p>	<p>Rekapitulasi Permohonan KTP-el</p>	<p>Bidang pelayanan pendaftaran kependudukan</p>
	<p>Cakupan Kepemilikan KK dibanding jumlah Kepala Keluarga</p>	<p>Jumlah KK yang tercetak dibagi jumlah KK dikali 100</p>	<p>Rekapitulasi Permohonan KK</p>	
	<p>Persentase anak yang memiliki KIA</p>	<p>Jumlah hasil pencetakan KIA dibagi Jumlah Anak usia 0-17 Tahun</p>	<p>Rekapitulasi Permohonan Akta Lahir</p>	
	<p>Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran</p>	<p>Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran dibagi Jumlah Anak usia 0-18 thn dikali 100</p>	<p>Rekapitulasi permohonan akta kelahiran online (lahir protot)</p>	<p>Bidang pelayanan pencatatan sipil</p>
<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>LHE APIP</p>	<p>LHE APIP</p>	<p>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p>

BUPATI DOMPU,



KADEK JAELANI